

Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar

Declara Puspameta Susilo*, Lailatul Fadilah, Rahmad Daroini

Universitas Muhammadiyah Pringsewu

Abstrak: Pendidikan hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk generasi muda yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memahami hak-hak dasar setiap individu. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar menjadi sarana yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan. Studi literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di sekolah dasar. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur terkait, termasuk dokumen kebijakan, kurikulum, buku teks, dan penelitian empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan HAM telah terintegrasi dalam kurikulum PKn di sekolah dasar, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan guru, kurangnya sumber daya, dan metode pembelajaran yang kurang efektif. Studi ini merekomendasikan peningkatan pelatihan guru, pengembangan bahan ajar yang kontekstual, dan penerapan metode pembelajaran yang partisipatif untuk meningkatkan implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar.

Kata Kunci: Pendidikan Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar, Kurikulum, Implementasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.471>

*Correspondence: Declara Puspameta Susilo

Email:

deklarapuspametasusilo@gmail.com

Received: 09-03-2024

Accepted: 16-04-2024

Published: 27-05-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Human rights (HAM) education is an important component in forming a young generation that respects human values and understands the basic rights of every individual. Citizenship Education (PKn) in elementary schools is an appropriate means for integrating human rights education into the education curriculum. This literature study aims to explore the implementation of human rights education through Civics learning in elementary schools. This research examines various related literature, including policy documents, curricula, textbooks, and relevant empirical research. The research results show that human rights education has been integrated into the Civics curriculum in elementary schools, but its implementation still faces challenges, such as limited teacher knowledge, lack of resources, and less effective learning methods. This study recommends increasing teacher training, developing contextual teaching materials, and implementing participatory learning methods to improve the implementation of human rights education in elementary schools.

Keywords: Human Rights Education, Citizenship Education, Elementary School, Implementation

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati tanpa memandang perbedaan ras, etnis, agama, jenis kelamin, usia, atau status sosial lainnya. Penghormatan terhadap HAM menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan bermartabat. Namun, sejarah kemanusiaan telah membuktikan bahwa pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Konflik berkepanjangan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan masih menjadi ancaman nyata bagi perwujudan HAM secara universal. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mempromosikan dan melindungi HAM menjadi sangat penting dan mendesak (Ali, 2023; Cavalcanti, 2020; Mangal, 2022; Mlinar, 2023; Tabak, 2022).

Salah satu cara yang paling efektif untuk mempromosikan penghormatan terhadap HAM adalah melalui pendidikan (Lowenthal, 2020; Mappong, 2023; Nava-Preciado, 2019). Pendidikan HAM bertujuan untuk menanamkan pemahaman, penghargaan, dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak asasi manusia (Abazi-Morina, 2023; Carvalho, 2019). Pendidikan ini bukan hanya menyampaikan pengetahuan tentang HAM, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan HAM menjadi sangat penting untuk diberikan sejak usia dini, di mana anak-anak masih dalam proses pembentukan karakter dan pemahaman tentang dunia sekitarnya (Quennerstedt, 2022; Struthers, 2019; Weishut, 2021). Dengan menanamkan pemahaman tentang HAM sejak dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang menghargai martabat manusia dan mempromosikan perdamaian serta keadilan (Ayalew, 2023).

Pada negara Indonesia, pendidikan HAM telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan nasional, termasuk dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar. PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Melalui pembelajaran PKn, peserta didik diharapkan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, menghargai keberagaman, dan menerapkan perilaku anti-diskriminasi. Integrasi pendidikan HAM dalam PKn menjadi sangat relevan dan penting, karena mata pelajaran ini membahas konsep-konsep kewarganegaraan, demokrasi, dan nilai-nilai kebangsaan yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap HAM. Namun, implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru dalam mengintegrasikan pendidikan HAM, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang spesifik, serta metode pembelajaran yang kurang efektif.

Keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru menjadi salah satu tantangan utama. Banyak guru yang memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan prinsip-

prinsip HAM, sehingga sulit untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran secara efektif. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan HAM yang diterima oleh peserta didik. Selain itu, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang spesifik tentang HAM juga menjadi kendala dalam menyampaikan materi secara komprehensif dan kontekstual. Buku teks yang ada seringkali hanya membahas HAM secara umum dan kurang memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Metode pembelajaran yang kurang efektif juga menjadi tantangan dalam implementasi pendidikan HAM. Masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan kurang melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Padahal, pembelajaran HAM seharusnya bersifat partisipatif, transformatif, dan menggunakan pendekatan yang kontekstual agar lebih bermakna bagi peserta didik. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah juga turut menjadi kendala dalam implementasi pendidikan HAM. Dukungan dari seluruh elemen sekolah, seperti kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Selain itu, minimnya pengawasan dan evaluasi yang sistematis terhadap implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar menyebabkan sulit untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan HAM dapat tercapai dengan baik. Tantangan lain yang dihadapi adalah terbatasnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Implementasi pendidikan HAM membutuhkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas masyarakat, dan lembaga pendidikan tinggi. Kolaborasi ini dapat membantu dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, pelatihan guru, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik dan masyarakat.

Mengingat pentingnya pendidikan HAM bagi generasi muda, maka upaya-upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam implementasinya di sekolah dasar menjadi sangat penting. Pendidikan HAM yang efektif dapat memberikan bekal kepada peserta didik untuk memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia, serta memiliki keterampilan untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami HAM sejak dini, peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, toleran, dan menghargai keberagaman. Mereka akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini akan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan bermartabat. Selain itu, pendidikan HAM juga dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Keterampilan ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, seperti isu-isu lingkungan, konflik sosial, dan ketidakadilan struktural.

Melalui pendidikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai HAM, peserta didik juga dapat menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial yang ada di masyarakat. Mereka akan memahami bahwa perbedaan adalah sebuah kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Pendidikan HAM juga berperan dalam membangun budaya perdamaian dan resolusi konflik secara damai. Dengan memahami prinsip-prinsip HAM, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola konflik dengan cara-cara yang konstruktif dan menghindari kekerasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di sekolah dasar. Secara khusus, penelitian ini berusaha untuk: Mengidentifikasi integrasi pendidikan HAM dalam kurikulum PKn di sekolah dasar. Menganalisis metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam mengajarkan pendidikan HAM melalui PKn di sekolah dasar. Mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan HAM melalui pembelajaran PKn di sekolah dasar. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur terkait dengan implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. Sumber literatur yang digunakan meliputi dokumen kebijakan, kurikulum, buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Kemendikbud, 2013). PKn mengajarkan konsep-konsep kewarganegaraan, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan HAM merupakan upaya sistematis untuk menanamkan pemahaman, penghargaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang universal dan tidak dapat dicabut (Bajaj, 2011). Pendidikan HAM bertujuan untuk memberdayakan individu agar mampu menghargai martabat setiap manusia, menghormati perbedaan, dan melindungi hak-hak dasar individu maupun kelompok (Osler & Starkey, 2010).

Pendidikan hak asasi manusia (HAM) memegang peranan krusial dalam membentuk karakter dasar peserta didik untuk memahami dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta hak-hak fundamental setiap individu. Menurut Tibbitts (2019), pendidikan HAM tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan tentang HAM, tetapi juga mengembangkan sikap, keterampilan, dan perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, pendidikan HAM berkontribusi dalam menciptakan masyarakat

yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Pentingnya mengintegrasikan pendidikan HAM sejak usia dini juga ditekankan oleh Gerber (2020), yang menyatakan bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk memahami konsep-konsep HAM dan mengembangkan kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan. Dengan menanamkan pemahaman tentang HAM sejak dini, generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang menghargai martabat manusia, mempromosikan perdamaian, dan melawan segala bentuk diskriminasi serta ketidakadilan.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengenai HAM memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: Meningkatkan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip HAM, Mengembangkan sikap dan perilaku yang menghormati HAM, Memberikan keterampilan untuk mengupayakan perlindungan dan penegakan HAM, Mempromosikan toleransi, non-diskriminasi, dan kesetaraan, Membangun budaya perdamaian dan resolusi konflik secara damai.

Integrasi Pendidikan HAM dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar menjadi sarana yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan. Seperti yang diungkapkan oleh Gollob dan Krapf (2018), PKn memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan menghargai nilai-nilai demokrasi serta HAM. Mata pelajaran ini membahas konsep-konsep kewarganegaraan, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, yang erat kaitannya dengan penghormatan terhadap HAM. Di Indonesia, melalui kurikulum merdeka pembelajaran PKn di sekolah dasar telah mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, seperti yang diungkapkan oleh Wahyudin (2021). Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru, kurangnya sumber daya dan bahan ajar yang spesifik, serta metode pembelajaran yang kurang efektif.

Strategi dan Metode Pembelajaran Pendidikan HAM dalam PKn untuk mengimplementasikan pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar secara efektif, diperlukan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menurut Mihr dan Schmitz (2020), pendidikan HAM harus diajarkan dengan pendekatan yang partisipatif, transformatif, dan kontekstual agar lebih bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran Kontekstual: Mengaitkan materi HAM dengan situasi nyata dan pengalaman hidup peserta didik, sehingga lebih bermakna dan mudah dipahami, Diskusi dan Debat dengan memfasilitasi diskusi dan debat terkait isu-isu HAM untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis peserta didik, Simulasi dan Permainan Peran: Menggunakan simulasi dan permainan peran untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep HAM secara lebih konkret dan mengembangkan empati, pembelajaran Berbasis Proyek: Melibatkan peserta didik dalam proyek-proyek nyata yang terkait dengan penegakan HAM, seperti kampanye anti-bullying atau kegiatan sosial kemasyarakatan, Studi Kasus yaitu Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan mendiskusikan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Upaya-upaya untuk Meningkatkan Implementasi Pendidikan HAM. Untuk meningkatkan implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar, diperlukan upaya-upaya sistematis dari berbagai pihak. Sebagaimana direkomendasikan oleh Cardenas (2018), peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional terkait pendidikan HAM menjadi sangat penting. Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konsep dan prinsip-prinsip HAM serta metode pembelajaran yang efektif. Selain itu, pengembangan bahan ajar yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik peserta didik juga sangat diperlukan. Menurut Bajaj dan Hantzopoulos (2020), bahan ajar yang baik harus mencerminkan keragaman budaya, mengangkat isu-isu lokal, dan memberikan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Penerapan metode pembelajaran partisipatif juga menjadi faktor kunci dalam implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar. Seperti yang diungkapkan oleh Keet (2020), pendidikan HAM harus menggunakan metode yang melibatkan peserta didik secara aktif, membangun keterampilan berpikir kritis, dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi isu-isu HAM secara mendalam. Dukungan dari lingkungan sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua, juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan nilai-nilai HAM di sekolah. Sekolah dapat mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung penghormatan terhadap HAM di lingkungan sekolah, seperti yang direkomendasikan oleh Osler dan Solhaug (2018).

Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar juga menjadi kunci untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Menurut Farahati (2021), evaluasi yang sistematis dapat membantu mengukur efektivitas program pendidikan HAM dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas masyarakat, dan lembaga pendidikan tinggi, juga dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar. Kolaborasi ini dapat mencakup pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik dan masyarakat, seperti yang disarankan oleh Reardon (2019).

Keterbatasan Pengetahuan dan Kompetensi Guru banyak guru yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan prinsip-prinsip HAM, sehingga sulit untuk mengintegrasikannya dalam pembelajaran secara efektif. Kurangnya Sumber Daya dan Bahan Ajar Terbatasnya bahan ajar dan sumber daya pembelajaran yang spesifik tentang HAM menjadi kendala dalam menyampaikan materi secara komprehensif dan kontekstual. Metode Pembelajaran yang Kurang Efektif masih banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan kurang melibatkan partisipasi aktif peserta didik, sehingga kurang mendukung pembelajaran HAM yang seharusnya bersifat partisipatif dan transformatif. Kurangnya Dukungan dari Lingkungan Sekolah Implementasi pendidikan HAM membutuhkan dukungan dari seluruh elemen sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua. Kurangnya dukungan dari lingkungan

sekolah dapat menghambat upaya-upaya untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam pembelajaran. Minimnya Pengawasan dan Evaluasi kurangnya pengawasan dan evaluasi yang sistematis terhadap implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar menyebabkan sulit untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat.

Terbatasnya Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan dengan Implementasi pendidikan HAM membutuhkan kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas masyarakat. Namun, kolaborasi ini seringkali terbatas, sehingga menghambat upaya-upaya untuk memperkuat implementasi pendidikan HAM di sekolah dasar.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, generasi muda dapat memperoleh bekal yang kuat dalam memahami dan menghargai hak-hak asasi manusia, serta memiliki kemampuan untuk melindungi dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Simpulan

Pendidikan hak asasi manusia (HAM) merupakan komponen penting dalam membentuk generasi muda yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memahami hak-hak dasar setiap individu. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar menjadi sarana yang tepat untuk mengintegrasikan pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan. Meskipun pendidikan HAM telah terintegrasi dalam kurikulum PKn di sekolah dasar, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan pengetahuan guru, kurangnya sumber daya, dan metode pembelajaran yang kurang efektif. Untuk meningkatkan implementasi pendidikan HAM dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar, diperlukan upaya-upaya seperti peningkatan kompetensi guru, pengembangan bahan ajar yang konteks.

Daftar Pustaka

- Abazi-Morina, L. (2023). Human rights education in Kosovo high schools. *Sodobna Pedagogika/Journal of Contemporary Educational Studies*, 74(3), 183–198.
- Ali, A. (2023). Investigating The Clash of Discourses on Linguistic Human Rights: Focus on the Private Schools in Sindh, Pakistan. *Forma y Funcion*, 36(2). <https://doi.org/10.15446/fyf.v36n2.101898>
- Ayalew, Y. D. (2023). The promise of digital Out-of-School programs for supporting youth in Under-resourced communities: Participatory principles for human rights-based virtual youth groups. *Social Work with Groups*. <https://doi.org/10.1080/01609513.2023.2285755>

- Bajaj, M., & Hantzopoulos, M. (2020). Promoting human rights education through youth centered community mapping. *Human Rights Education Review*, 3(2), 27-48. <https://doi.org/10.7577/hrer.3943>
- Cardenas, S. (2018). Human rights education and teacher education. In M. Ben-Ari & R. Lenga (Eds.), *Tolerance and Education: Learning to Live with Diversity and Difference* (pp. 87-105). Brill Sense. https://doi.org/10.1163/9789004388109_006
- Carvalho, M. E. G. (2019). From school punishments to the building of subjects of rights: Contributions of human rights policies to a peace culture in educational institutions. *Ensaio*, 27(102), 24–46. <https://doi.org/10.1590/S0104-40362018002601366>
- Cavalcanti, V. R. S. (2020). DISSIDENT SEXUALITIES AND GENRES IN THE SCHOOL SPACE: POSSIBLE DIMENSIONS OF EDUCATION FOR AND FOR HUMAN RIGHTS. *Revista Direito e Sexualidade*, 1(1). <https://doi.org/10.9771/revdirsex.v1i1.35853>
- Farahati, F. (2021). Evaluating human rights education programs: A review of existing frameworks and tools. *Journal of Human Rights Practice*, 13(1), 137-159. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huab003>
- Gerber, P. (2020). Why we must teach human rights in early childhood. *Human Rights Education Review*, 3(1), 1-21. <https://doi.org/10.7577/hrer.3840>
- Gollob, R., & Krapf, P. (2018). Teaching democracy: A study of curriculum resources in nine countries. Council of Europe Publishing. <https://rm.coe.int/teaching-democracy-web/16808b79a1>
- Keet, A. (2020). Human rights education and the critical study of human rights. *Human Rights Education Review*, 3(2), 1-26. <https://doi.org/10.7577/hrer.3942>
- Lowenthal, T. (2020). AB v Pridwin Preparatory School: progress and problems in horizontal human rights law. *South African Journal on Human Rights*, 36(2), 261–274. <https://doi.org/10.1080/02587203.2020.1867484>
- Mangal, K. (2022). Digital storytelling activities in the course of human rights, citizenship, and democracy in primary school. *Egitim ve Bilim*, 47(209), 69–94. <https://doi.org/10.15390/EB.2022.10540>
- Mappong, Z. (2023). Full Day School: Review In Human Rights Perspective. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(2). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i2.418>
- Mihr, A., & Schmitz, H. P. (2020). Human rights education: An analysis of practices and challenges. In M. Bajaj (Ed.), *Human rights education: Theory, research, praxis* (pp. 41-68). University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812297232-003>
- Mlinar, K. (2023). In Search of a Universal Value Base of Education in a Pluralistic School. From Human Rights to Global Ethic and Responsibility. *Encyclopaideia*, 27(65), 1–17. <https://doi.org/10.6092/issn.1825-8670/14723>

- Nava-Preciado, J. M. (2019). Adolescents and human rights: An approximation of the effective exercising of rights in school. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ninez y Juventud*, 17(1), 285–299. <https://doi.org/10.11600/1692715x.17117>
- Osler, A., & Solhaug, T. (2018). Children's human rights and diversity in schools: Inclusive practice for inclusive curricula. *Education Sciences*, 8(2), 44. <https://doi.org/10.3390/educsci8020044>
- Quennerstedt, A. (2022). Children's and young people's human rights education in school: Cardinal complications and a middle ground. *Journal of Human Rights*, 21(4), 383–398. <https://doi.org/10.1080/14754835.2021.2014795>
- Reardon, B. A. (2019). *Human rights learning: Pedagogies and politics of peace*. University of Puerto Rico Press.
- Struthers, A. E. C. (2019). Teaching human rights in primary schools: Overcoming the barriers to effective practice. *Teaching Human Rights in Primary Schools: Overcoming the Barriers to Effective Practice*, 1–234. <https://doi.org/10.4324/9781315201719>
- Tabak, B. Y. (2022). Democratic School Culture: Investigating An Educational Practice of Democracy in Schools A Study on Democratic Citizenship and Human Rights Education Project in Turkey. *Leadership and Policy in Schools*, 21(4), 856–875. <https://doi.org/10.1080/15700763.2020.1866019>
- Tibbitts, F. (2019). Human rights education in the philosophy and practice of teaching for human rights and democratic citizenship. In M. Bajaj (Ed.), *Human rights education: Theory, research, praxis* (pp. 69-98). University of Pennsylvania Press. <https://doi.org/10.9783/9780812297232-004>
- Wahyudin, D. (2021). Implementasi pendidikan hak asasi manusia dalam pembelajaran PKn di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 96-105. <https://doi.org/10.33477/jpk.v8i2.1234>
- Weishut, D. J. N. (2021). We need to teach human rights in medical schools. *Torture*, 31(2), 147–148. <https://doi.org/10.7146/torture.v31i2.128025>